



# LAPORAN INOVASI DAERAH

**Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang**

**Nomor Registrasi: 33.25-13954-39551-2021**

## 1. PROFIL INOVASI

### 1.1. Nama Inovasi

JDIH DPRD Batang Terintegrasi

### 1.2. Dibuat Oleh

Sekretariat DPRD Kab. Batang ( setwan.batang )

### 1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

### 1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

### 1.5. Jenis Inovasi

Digital

### 1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

### 1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Presiden telah menetapkan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui

menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dokumentasi terhadap sebuah produk hukum menjadi kewenangan setiap instansi, baik pemerintah atau swasta, namun antar instansi tersebut perlu saling terintegrasi dalam memberikan informasi hukum yang benar.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan sebagai wadah pusat informasi, dan manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum yang nantinya akan memberikan kinerja yang prima bagi lingkungan DPRD Kabupaten Batang sehingga perlu dibangunnya Sistem Aplikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Batang yang dapat diakses secara mudah oleh user internal maupun masyarakat.

Pengelolaan JDIH DPRD yang terintegrasi dengan sistem JDIHN ini tidak hanya dapat menunjang fungsi internal suatu instansi, tetapi juga dapat menjadi wadah untuk memonitor serta mengevaluasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi lain, baik oleh instansi pusat maupun instansi daerah. Selain itu JDIHN juga merupakan bagian dari Revitalisasi Hukum Jilid II yang dicanangkan oleh Pemerintah, sebagai salah satu agenda terpenting yaitu penataan regulasi dengan tersedianya database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Prestasi membanggakan diraih DPRD Kabupaten Batang dengan meraih posisi terbaik ketiga sebagai Anggota Jaringan Data dan Inforhukum Nasional (JDIHN) untuk kategori Sekretariat DPRD. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, di Jakarta. Raihan prestasi ini membawa nama baik Kabupaten Batang di kancah nasional.

Berdasarkan piagam penghargaan yang telah disampaikan kepada Setwan DPRD Kabupaten Batang. Prestasi yang tertulis adalah DPRD Kabupaten Batang sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terbaik ke tiga tahun 2020 Kategori Sekretariat DPRD.

### **1.9. Tujuan Inovasi Daerah**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Batang merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya khususnya produk hukum di lingkungan DPRD kabupaten Batang secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

### **1.10. Manfaat Yang Diperoleh**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

### 1.11. Hasil Inovasi

<https://jdih.dprd.batangkab.go.id/>

### 1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

30-06-2020

### 1.13. Waktu Implementasi

31-12-2020

### 1.14. Anggaran

<https://res.tuxedovation.com/7cd824e36c2a8583ad552131705b17aab69b7e30.pdf>

### 1.15. Profil Bisnis -

### 1.16. Kematangan

112.00

## 2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Tim Teknis JDIH pada Setwan batang
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Tim Teknis JDIH pada Setwan batang
3. Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	SPK JDIH
4. Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	ss
5. Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	NOTA LAPORAN DINAS MENGIKUTI JDIH
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia

7. Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Tim Teknis JDIH pada Setwan batang
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	manual
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Tim Teknis JDIH pada Setwan batang
11. Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	halaman kontak kami
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 aktor	stakeholder
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP JDIH
15. Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	playstore
16. Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	spkjdih
17. Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	pengguna
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian	penghargaan
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	sosmed, Berita JDIH
20. Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	JDIH DPRD Batang

